



FIAN
INDONESIA

VISIBILITAS KELAPARAN DALAM HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

INFOBRIEF

AMIR MAHMUD



POIN PENTING

- ◉ Kelaparan disebabkan oleh kegagalan kebijaksanaan politik negara karena tidak memiliki kecakapan dalam merespon pencegahan kelaparan sebagai bencana kemanusiaan.
- ◉ Kelaparan terjadi secara pelan-pelan dan diam-diam tapi melalui sebuah tahapan yang dapat dikenali di antaranya melalui kelangkaan pangan (wilayah, rumah tangga dan individu), sangat lapar disertai penurunan asupan pangan dan gizi, keparahan kurang gizi, dan kematian sehingga dapat dicegah sebelum tubuh menderita gizi buruk yang akut, dan terjadi korban kematian.
- ◉ Penerapan sistem peringatan dini kelaparan yang melibatkan lintas sektor dan aktor secara inklusif dengan menggunakan data dan publikasi data secara terintegrasi.

PENGANTAR

Dalam 21 tahun terakhir kita telah menyaksikan kemunculan rawan pangan, kelaparan, gizi buruk dan penyakit yang menimpa sejumlah warga. Pada awal tahun 2018 Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak yang menyerang ratusan warga di Kabupaten Asmat, Papua, dan puluhan meninggal dunia[1]. Pada tahun 2009 puluhan hingga ratusan warga meninggal akibat kelaparan di Kabupaten Yahukimo, Papua. Di tempat itu pula, puluhan warga negara meninggal pada tahun 2005[2]. Serupa dengan itu, di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 terjadi kematian 11 balita akibat gizi buruk[3].

Kasus-kasus seperti di atas biasanya muncul ke permukaan publik ketika kondisi tubuh sudah akut atau berakibat pada kematian “massal”. Korban kematian dan dalam jumlah besar masih dianggap sebagai titik puncak peristiwa yang dikenali sehingga menjadi indikator umum yang menyentak publik terutama negara. Padahal dari kelangkaan pangan (wilayah, rumah tangga dan individu), gizi buruk, hingga kelaparan yang berakibat pada kematian merupakan sebuah proses bertahap relatif panjang yang terjadi secara pelan-pelan dan diam-diam. Proses bertahap ini harus dikenali dan ditampakkan agar peristiwa serupa tidak terulang.

[1] Kompas.com, "Satgas Terpadu KLB Asmat Temukan 646 Kasus Campak dan 144 Gizi Buruk", di akses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/01/25/14070311/satgas-terpadu-klb-asmat-temukan-646-kasus-campak-dan-144-gizi-buruk>, 30 April 2021, dan Kompas.com, "Menkes: 71 Orang Meninggal dalam Kasus Gizi Buruk dan Campak di Asmat", diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/15410691/menkes-71-orang-meninggal-dalam-kasus-gizi-buruk-dan-campak-di-asmat>, 30 April 2021.

[2] Kompas.com, "Waduh, Yahukimo Dilanda Bencana Kelaparan Hebat ", diakses di <https://megapolitan.kompas.com/read/2009/09/04/17180713/waduh.yahukimo.dilanda.bencana.kelaparan.hebat?page=all#page2>, 30 April 2021, dan Liputan6, "Bencana Kelaparan di Yahukimo, 113 Tewas" diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/243144/bencana-kelaparan-di-yahukimo-113-tewas>, 30 April 2021.

[3] Kompas.com, "Dalam Lima Bulan, 11 Anak Balita Meninggal karena Gizi Buruk", diakses di <https://regional.kompas.com/read/2015/06/25/15245431/Dalam.Lima.Bulan.11.Anak.Balita.Meninggal.karena.Gizi.Buruk>, 30 April 2021, dan Kompas.com, "Mensos: Peristiwa di NTT Bukan Kelaparan, tapi Rawan Pangan", diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2015/06/26/13523611/Mensos.Peristiwa.di.NTT.Bukan.Kelaparan.tapi.Rawan.Pangan>, 30 April 2021.

PANGAN, KELAPARAN & UPAYA PEMANTAUAN

Tulisan ini menguraikan topik dari pertanyaan, bagaimana kelaparan berproses dalam daur kehidupan manusia? Kelaparan muncul dan menjangkiti dalam proses daur kehidupan terutama bagi kelompok rentan seperti balita dan perempuan yang paling menderita lebih awal. Kelaparan terjadi kurang lebih dalam tahapan: kelangkaan pangan (wilayah, rumah tangga dan individu), rasa lapar disertai penurunan asupan makanan dan gizi, gizi buruk, dan kematian. Tulisan ini bertujuan (1) untuk mengajak agar sensitif dalam mengenali dan mengidentifikasi proses kelaparan sebelum warga negara mengidap malnutrisi akut, dan sebelum terjadi korban kematian, dan (2) untuk mendorong realisasi Hak Atas Pangan dan Gizi sebagai kewajiban negara bagi setiap warganya.

Situasi “lapar” dan “kelaparan” merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang dapat merujuk pada beberapa istilah dalam bahasa Inggris seperti “*hunger*”, “*famish*”, “*famine*” dan “*starvation*”[4]. Istilah dalam bahasa Inggris tersebut memiliki gradasi keparahan dan magnitude-nya mengenai lapar atau kelaparan. *Global Hunger Index* dengan indikatornya menggunakan istilah “*hunger*” untuk menilai keparahan kelaparan. Di samping itu, terdapat juga kelaparan terselubung dengan bahasa Inggris “*hidden hunger*” yang merujuk pada *micronutrient deficiency* (kekurangan gizi mikro). Dari sudut pandang kesehatan dan gizi, dikenal istilah “*malnutrition*” (gizi kurang), “*undernutrition*” (gizi buruk), “*stunting*” (tengkes/pendek), “*wasting*” (kurus), dan “*obesity*” (obesitas) yang memiliki kaitan dengan asupan pangan, lapar dan kelaparan.

Tabel 1 – Status Gizi

Status Gizi	Keterangan
<i>Malnutrition</i> (kekurangan gizi)	Penyimpangan dari status gizi yang memadai dan optimal, termasuk kekurangan energi (<i>undernutrition</i>) dan gizi lebih (seperti obesitas).
A. <i>Undernutrition</i> (gizi buruk)	Asupan tidak memadai pada makanan berenergi yang dibutuhkan, atau status gizi buruk secara umum.
1. <i>Maternal underweight</i>	Indeks massa tubuh <18,5 di antara wanita usia reproduksi

[4] Hunger (noun) 1. The state of not having enough food to eat, especially when this cause illness or death, 2. The feeling caused by a need to eat. Famished (adj.) very hungry. Famine (noun) a lack of food during a long period of time in a region. Starvation (noun) the state of suffering and death caused by having no food. Lihat AS. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Oxford: Oxford University Press.

2. <i>Stunting</i> (tengkes/pendek)	Tinggi/panjang badan lambat. Pendekatan antropometri: tinggi badan menurut usia di bawah -2.00 dan di bawah -3.00 standar deviasi. Juga ada pendekatan kombinasi antropometri dan klinis.
3. <i>Wasting</i> (kurus)	Berat badan rendah yang tidak sesuai tinggi badan (BB/TB) dengan standar deviasi -3,0 s.d. < -2,0.
4. <i>Micro deficiency</i>	Kekurangan berbagai vitamin dan mineral utama. Misalnya, anemia (kurang zat besi) dan lainnya.
B. <i>Obesity</i>	Kelebihan berat badan > 20%
<i>Overweight</i>	Kelebihan berat badan 10% - 20%

Asupan makanan dari sumber ragam pangan sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia dengan jenis kandungan dan jumlah kadar tertentu, dan sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Kandungan zat dalam makanan yang diperlukan secara cukup pada tubuh di antaranya karbohidrat, protein, lemak, serat, mineral, vitamin, dan air. Zat itu dibagi dua: zat gizi makro (karbohidrat, protein, lemak) dan zat gizi mikro (mineral, vitamin). Kekurangan dan kelebihan zat gizi pada asupan makanan justru dapat menimbulkan malnutrisi seperti *undernutrition* (gizi buruk), *overweight* (kelebihan berat badan 10-20%), dan *obesity* (kelebihan berat badan > 20%). Gizi buruk mencakup *maternal underweight* (kurang berat badan ibu), *child stunting* (balita tengkes), *child wasting* (balita kurus), atau *micro deficiency* (kekurangan gizi mikro)[5].

Dari gambaran kelaparan di atas terdapat beberapa fase penting dalam daur kehidupan manusia mulai dari ada/ketiadaan asupan pangan, lapar, kerentanan penyakit, timbul malnutrisi hingga berdampak pada kematian. Rangasami membagi tiga periodik dari proses kelaparan (*famine*)[6]. Pertama, kelangkaan (*dearth*), yang berkonotasi sosial dan ekonomi. Periode kelangkaan menyebabkan kebutuhan manusia tak terpenuhi. Kedua, sangat lapar (*famishment*) menandakan sebuah pergerakan yang berproses menuju kelaparan (*starvation*). Ketiga, morbiditas (*morbidity*) merujuk pada proporsi penyakit pada suatu tempat tertentu, yang mencakup (implikasi) fisiologis dan (tekanan) sosial. Dengan demikian, tidak perlu ada korban kematian sebagai puncak dari kelaparan sebab terdapat tahapan dan proses untuk dikenali dan direspon cepat sebelum terjadi korban kematian. Lebih maju lagi, gizi buruk akut bukan sebagai puncak kulminasi kelaparan sehingga dapat dicegah sebelum terjadi.

[5] Patrick Webb, Hunger and malnutrition in the 21st century, BMJ 2018; 361 doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.k2238>

[6] Amrita Rangasami, Failure of Exchange Entitlements' Theory of Famine: A Response, Economic and Political Weekly, Oct. 12, 1985, Vol. 20, No. 41 (Oct. 12, 1985), pp. 1747-1752.

Sementara itu, DeRose et al. membuat tiga tipologi situasi kelaparan (*hunger*), yaitu: kelangkaan pangan (*food shortage*), kemiskinan pangan (*food poverty*), dan perampasan pangan (*food deprivation*)[7]. Kelangkaan produksi pangan di tingkat regional/nasional (kelangkaan pangan), ketersediaan pangan yang tidak memadai di dalam rumah tangga (kemiskinan pangan), dan malnutrisi individu (perampasan pangan) mempunyai saling berkaitan dari ketiganya secara erat. Pada level wilayah (nasional/regional), kelangkaan produksi pangan berkorelasi dengan keberadaan pangan di level rumah tangga dan individu. Namun di level rumah tangga, situasinya harus diperiksa secara periodik karena berkaitan dengan penyebab antara lain tingkat kemiskinan dalam pemenuhan pangan rumah tangga, diskriminasi berdampak pada distribusi pangan, dan pengetahuan kebutuhan pangan dan gizi.

Saat ini Indonesia mempunyai tipologi krisis[8] pangan berdasarkan wilayah administratif yakni nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kriteria krisis pangan meliputi: a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu; b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.

Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

Tabel 2 - Krisis Pangan

	Nasional	Provinsi	Kabupaten/Kota
Darurat krisis pangan	Jumlah yang penduduk krisis pangan > 50% dari total jumlah penduduk nasional, atau > 1 provinsi.	Jumlah penduduk yang krisis pangan > 50% dari total jumlah penduduk provinsi, atau > 1 kab/kota dalam 1 provinsi.	Jumlah penduduk yang krisis pangan > 50% dari total jumlah penduduk kab/kota.
Siaga 1	Jumlah penduduk yang krisis pangan > 70% dari total jumlah penduduk nasional, atau Jumlah penduduk yang krisis pangan > 70% dari total jumlah penduduk provinsi yang krisis pangan.	Jumlah penduduk yang krisis pangan > 70% dari total jumlah penduduk provinsi, atau Jumlah penduduk yang krisis pangan > 70% dari total jumlah penduduk kab/kota yang krisis pangan.	Jumlah penduduk krisis pangan > 70% dari total jumlah penduduk kab/kota.

[7] Laurie DeRose, Ellen Messer, and Sara Millman, Who's hungry? And how do we know? Food shortage, poverty, and deprivation, Hongkong: The United Nations University, 1998.

[8] Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

Siaga 2	Jumlah penduduk yang krisis pangan >50%- 70% dari total jumlah penduduk nasional, atau Jumlah penduduk yang krisis pangan >50%-70% dari total jumlah penduduk provinsi yang krisis pangan.	Jumlah penduduk yang krisis pangan >50%-70% dari total jumlah penduduk provinsi, atau Jumlah penduduk yang krisis pangan >50%-70% dari total jumlah penduduk kab/kota yang krisis pangan.	Jumlah penduduk krisis pangan >50%-70% dari total jumlah penduduk kab/kota.
Siaga 3	Jumlah penduduk yang krisis pangan >40%-50% dari total jumlah penduduk nasional, atau Jumlah penduduk yang krisis pangan >40%-50% dari total jumlah penduduk provinsi yang krisis pangan.	Jumlah penduduk yang krisis pangan >40%-50% dari total jumlah penduduk provinsi, atau Jumlah penduduk yang krisis pangan >40%-50% dari total jumlah penduduk kab/kota yang krisis pangan.	Jumlah penduduk krisis pangan >40%-50% dari total jumlah penduduk kab/kota.

Sumber: PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Krisis pangan berdasarkan wilayah tersebut dapat digunakan untuk melihat ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan kecukupan kandungan gizi. Namun penyematan label krisis pangan cenderung menekankan pada jumlah/persentase besar yang mengalami krisis pangan dalam suatu wilayah administratif. Krisis pangan belum bisa memotret kasus krisis pangan rumah tangga dan individu dengan jumlah terbatas (di bawah persentase krisis pangan) dalam daur kehidupan mereka tapi sangat penting diperhatikan.

Selain krisis pangan berbasis wilayah, Kementerian Pertanian mempunyai Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)[9]. SKPG merupakan instrumen/alat deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah dan memberi informasi alternatif tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan.

Berpijak pada konsep ketahanan pangan, SKPG termasuk bagian dari *Timely Warning and Intervention System* (TWIS) yang terdiri atas tiga aspek yang diukur, yakni produksi dan ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

[9] Rawan pangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Rawan gizi merupakan suatu kondisi/keadaan dimana banyak penduduk mengalami kekurangan gizi. Lihat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Panduan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Jakarta, 2019.

Tabel 3 - Indikator Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Aspek	Indikator	Sumber Data
Ketersediaan Pangan	1. Luas tanam komoditas pangan bulan berjalan; 2. Luas tanam komoditas pangan bulan berjalan 5 tahun terakhir; 3. Luas puso komoditas pangan bulan berjalan; dan 4. Luas puso komoditas pangan bulan berjalan 5 tahun terakhir. <i>Catatan: (a) Untuk seluruh wilayah kab/kota adalah komoditi padi; (b) Untuk wilayah NTT, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara adalah komoditas padi, jagung, ubi kayu; dan (c) Untuk wilayah Papua adalah komoditas padi, ubi jalar, dan ubi kayu</i>	Dinas Pertanian, dan BPS
Akses Pangan	1. Harga beras; 2. Harga jagung; Harga ubi jalar; dan 4. Harga ubi kayu <i>Catatan: (a) Untuk seluruh wilayah kab/kota adalah harga komoditi pangan beras; (b) Untuk wilayah NTT, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara adalah harga beras, jagung, dan ubi kayu; dan (c) Untuk wilayah Papua adalah harga beras, ubi jalar, dan ubi kayu</i>	Disperindag, BPS, dan Dinas yang menangani Ketahanan Pangan
Pemanfaatan Pangan	1. Angka Balita Ditimbang terkoreksi (D'); 2. Angka Balita Naik Berat Badan (N); 3. Balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T); dan 4. Angka Balita dengan Berat Badan Dibawah Garis Merah (BGM)	Dinas Kesehatan
Data Pendukung Spesifik Lokal	1. Data kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain); 2. Data curah hujan; 3. Kasus gizi buruk yang ditemukan; 4. Perubahan pola konsumsi pangan; 5. Data sebaran OPT; dan 6. Cadangan pangan	BPBD, BMKG, Dinkes, BPS, Dinas Pertanian, Dinas yang menangani Ketahanan Pangan, Bulog & SKPD terkait

Sumber: Panduan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Setiap aspek mempunyai indikator yang datanya berasal dari beberapa sumber. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, dan menghasilkan skor komposit dan bobot. Skor komposit dibuat pembobotan: 1. Aman (warna hijau), 2. Waspada (warna kuning), dan 3. Rentan (warna merah). Masing-masing hasil pembobotan (warna) ditindaklanjuti dengan tindakan/kegiatan. Misalnya, indikator komposit ketersediaan pangan berwarna kuning (skor komposit 3-4), maka ditindaklanjuti dengan peningkatan kewaspadaan melalui pemantauan harga beras pada 3-4 bulan ke depan.

Sebagai catatan, SKPG ini dapat disempurnakan dengan memperluas kelompok rentan perempuan dalam pemanfaatan pangan seperti ibu hamil dan ibu menyusui. Sebab, situasi gizi buruk dapat dimulai sejak kehamilan hingga menyusui. Begitu pula, data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dijadikan rujukan mengenai data tingkat kemiskinan dan tingkat konsumsi (kalori dan protein). Sebab, kecukupan kalori dan protein yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu merupakan salah satu pertanda kemunculan persoalan kekurangan gizi. Data penerima bantuan sosial juga membantu dalam mendeteksi dini pada level rumah tangga dan individu mengenai situasi kelangkaan dan kecukupan asupan pangan.

PENYEBAB DAN DAMPAK KELAPARAN

Ada dua paradigma kelaparan (famine), yaitu: 'kelaparan lama' dan 'kelaparan baru'[10]. Pergeseran pemikiran ini membutuhkan dua perubahan paradigma: dari kelaparan sebagai kegagalan ketersediaan pangan, kegagalan akses ke makanan, hingga kegagalan akuntabilitas dan respon. Merujuk pada paradigma kelaparan 'lama', kelaparan dipicu oleh bencana alam (kekeringan, banjir, cuaca dingin yang ekstrim, belalang, hawar panen, penyakit ternak) atau oleh konflik, yang menghancurkan basis subsisten suatu komunitas agraris, menyebabkan mereka hidup dengan pasokan makanan yang tidak mencukupi untuk bertahan hidup. Hal ini terjadi dalam konteks kondisi ekonomi lokal lemah dan ketiadaan kemauan politik dan kapasitas untuk campur tangan dalam mengatasinya.

Paradigma kelaparan baru mempunyai dua ciri khas. Pertama, politik sebagai pusat penjelasan penyebab kelaparan, dan kedua, fokus analitis pada kegagalan untuk mencegah kelaparan, daripada pemicu kekurangan pangan atau gangguan akses terhadap makanan. Penjelasan politik itu berisi empat faktor: pertama, kelaparan terkait dengan rezim politik. Kedua, kelaparan sering dikaitkan dengan konflik, tetapi dengan cara yang lebih rumit daripada dalam konflik-kelaparan historis. Ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan kelaparan telah menjadi 'mengglobal' ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keempat, dalam kelaparan kontemporer adalah peran 'jaring pengaman sosial internasional' dalam pencegahan kelaparan. Dengan demikian, persoalan kelaparan adalah tanggung jawab negara, yang harus dicegah sebelum terjadi secara masal baik pada level komunitas maupun level individu.

[10] Stephen Devereux (ed.), *The New Famines, why famines persist in an era of globalization*. New York: Routledge, 2007.

Kerugian akibat kelaparan termasuk kelaparan terselubung dapat dilihat dari aspek malnutrisi seperti *undernutrition*, kelebihan berat (*overweight*), and obesitas (*obesity*). Sejauh ini Indonesia menanggung beban ganda malnutrisi terutama gizi buruk dan obesitas. Dari perhitungan ekonomi, kerugian dari kurang gizi mencapai 300 triliun[11].

PENUTUP

Kelaparan mempunyai proses dan tahapan relatif panjang yang dapat diidentifikasi dalam daur kehidupan warga negara: kelangkaan pangan (wilayah, rumah tangga dan individu), sangat lapar disertai penurunan asupan pangan dan gizi, keparahan kurang gizi, hingga kematian. Korban kematian tidak harus menjadi puncak dari tanda bukti adanya kelaparan. Begitu pula, tahap tubuh menderita kekurangan gizi akut bukan satu-satunya bukti adanya kelaparan.

Keduanya dapat dicegah sebelum muncul dan terjadi pada individu dan komunitas. Kelangkaan pangan dan penurunan asupan makanan bergizi (wilayah, rumah tangga dan individu) dalam jangka waktu tertentu dapat menjadi indikator penting terjadinya indikasi kelaparan terutama pada level rumah tangga dan individu. Sistem peringatan dini pencegahan kelaparan harus dikoreksi dan diperbaiki untuk keselamatan dan kesehatan tiap warga Indonesia.

Selain itu, sistem imunitas tubuh lemah dan mudah terserang penyakit. Malnutrisi berdampak pada gangguan fungsi otot, fungsi jantung-pernapasan, fungsi gastrointestinal, kekebalan dan penyembuhan luka, dan efek psikososial.[12]

Kelaparan termasuk kelaparan terselubung mempunyai risiko dan dampak potensial pada:

1. Pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi oleh negara karena kegagalan negara dalam melakukan respon cepat pencegahannya.
2. Lingkaran setan yang serius dalam persoalan kelaparan pada daur kehidupan dan antar-generasi bagi perempuan dan ibu hamil kurang gizi yang melahirkan anak kurang gizi pula.
3. Pudarnya hingga hilangnya generasi sehat, cerdas-kritis dan produktif untuk membangun peradaban kehidupan bangsa yang inklusif, demokratis dan berkeadilan.

[11] Tempo, "Bappenas: Kerugian Ekonomi Akibat Kurang Gizi Bisa Capai Rp 300 T" diakses di <https://bisnis.tempo.co/read/1177266/bappenas-kerugian-ekonomi-akibat-kurang-gizi-bisa-capai-rp-300-t>, 30 April 2021.

[12] John Saunders & Trevor Smith, Malnutrition: causes and consequences, Clinical Medicine 2010, Vol 10, No 6: 624–7.

REFERENSI

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2019). Panduan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Jakarta.

DeRose, L., Messer, E., & Millman, S. (1998). Who's hungry? And how do we know? Food shortage, poverty, and deprivation, Hongkong: The United Nations University.

Devereux, S. (ed.). (2007). The New Famines, Why famines persist in an era of globalization. New York: Routledge.

Hornby, AS. (2000). Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 6th ed. Oxford: Oxford University Press.

Kompas.com, "Dalam Lima Bulan, 11 Anak Balita Meninggal karena Gizi Buruk", diakses di <https://regional.kompas.com/read/2015/06/25/15245431/Dalam.Lima.Bulan.11.Anak.Balita.Meninggal.karena.Gizi.Buruk>, 30 April 2021.

Kompas.com, "Menkes: 71 Orang Meninggal dalam Kasus Gizi Buruk dan Campak di Asmat", diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/15410691/menkes-71-orang-meninggal-dalam-kasus-gizi-buruk-dan-campak-di-asmat>, 30 April 2021.

Kompas.com, "Mensos: Peristiwa di NTT Bukan Kelaparan, tapi Rawan Pangan", diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2015/06/26/13523611/Mensos.Peristiwa.di.NTT.Bukan.Kelaparan.tapi.Rawan.Pangan>, 30 April 2021.

Kompas.com, "Satgas Terpadu KLB Asmat Temukan 646 Kasus Campak dan 144 Gizi Buruk", di akses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/01/25/14070311/satgas-terpadu-klb-asmatt-temukan-646-kasus-campak-dan-144-gizi-buruk>, 30 April 2021.

Kompas.com, "Waduh, Yahukimo Dilanda Bencana Kelaparan Hebat ", diakses di <https://megapolitan.kompas.com/read/2009/09/04/17180713/waduh.yahukimo.dilanda.bencana.kelaparan.hebat?page=all#page2>, 30 April 2021.

Liputan6, “Bencana Kelaparan di Yahukimo, 113 Tewas” diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/243144/bencana-kelaparan-di-yahukimo-113-tewas>, 30 April 2021.

Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Rangasami, A. (1985). Failure of Exchange Entitlements' Theory of Famine: A Response, *Economic and Political Weekly*, Oct. 12, Vol. 20, No. 41 (Oct. 12, 1985), pp. 1747-1752.

Saunders, J. & Smith, T. (2010). Malnutrition: causes and consequences, *Clinical Medicine*, Vol 10, No 6: 624–7.

Tempo, “Bappenas: Kerugian Ekonomi Akibat Kurang Gizi Bisa Capai Rp 300 T” diakses di <https://bisnis.tempo.co/read/1177266/bappenas-kerugian-ekonomi-akibat-kurang-gizi-bisa-capai-rp-300-t>, 30 April 2021.

Webb, P. (2018). Hunger and malnutrition in the 21st century, *BMJ*; 361 doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.k2238>